

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako di Kota Semarang terutama pada kecamatan Semarang Utara dengan menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin jika dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal atau belum berjalan dengan cukup baik karena belum dapat memenuhi 3 indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Ripley and Franklin. Dalam implementasinya indikator yang sudah berjalan dengan baik hanya dalam aspek lancarnya rutinitas fungsi (*smoothly functioning routines*) dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*desired performance in and impacts*).

Berhasilnya pada dimensi rutinitas fungsi dalam implementasi program bantuan sosial sembako dapat dilihat dari tidak adanya keterlambatan dalam proses pencairan, tidak ada kekurangan pada jumlah bantuan yang diberikan yaitu selalu sesuai dengan kebijakan yang ada, serta sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa rutinitas fungsi yang ada telah berjalan dengan cukup baik pada implementasi program bantuan sosial sembako.

Selain itu, jika dilihat dari dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, implementasi program jaminan sosial ini dapat dikatakan

berjalan dengan cukup baik, hal tersebut karena tujuan, manfaat dan dampak yang dikehendaki dari adanya program ini yaitu membantu masyarakat miskin telah tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah pernyataan para masyarakat yang menerima program bantuan sosial tersebut dan menjelaskan bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan adanya program ini.

Namun, dari berjalannya implementasi program bantuan sosial sembako ini, peneliti juga menemukan sejumlah kekurangan yaitu pada dimensi kepatuhan. Pada dimensi kepatuhan ditemukan bahwa salah satu hal yang perlu dibenahi terdapat pada dimensi kepatuhan (*compliance*) yaitu, dapat dilihat bahwa indikator Perilaku dari Implementor yang ada pada dimensi kepatuhan yang masih kurang berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum patuhnya para implementor kebijakan dengan Permensos yang ada seperti belum terlaksananya sosialisasi serta masih adanya masalah terkait ketidaktepatan target penerimaan bansos. Terdapat juga perbedaan pernyataan dengan kondisi yang ada sebenarnya dilapangan dimana pernyataan dari dinas terkait adalah rutin melakukan sosialisasi, tetapi pada kenyataannya dilapangan, masyarakat mengatakan tidak ada sosialisasi rutin yang dilakukan. Selain itu, pada dimensi kepatuhan ini juga ditemukan masih terdapatnya kasus salah target penerima bantuan sosial yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa para implementor kebijakan masih kurang dapat melakukan pengawasan terkait siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan tersebut.

Selain itu, kurang berjalan dengan baiknya indikator kepatuhan dapat dilihat dari ketidakpatuhan dinas sosial Kota Semarang terhadap Permensos

Nomor 5 tahun 2021 pasal 15 ayat 8 tertulis, “Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial”, pada prakteknya dilapangan kasus ketidaktepatan target masih ditemukan di lapangan hal tersebut karena dinas sosial setempat kurang melakukan finalisasi data dengan baik sehingga masalah ketidaktepatan tarhet tersebut masih ditemukan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini sudah cukup berhasil membantu masyarakat dan dalam dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki telah berjalan dengan baik, namun masih kurang optimal dalam dimensi kepatuhan. Oleh karena itu, karena masih adanya dimensi yang belum terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako masih belum berjalan dengan optimal sehingga masih diperlukan adanya pembenahan serta evaluasi lebih lanjut agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini.

4.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini menemukan keterbatasan atau kendala dalam hal memperoleh data jumlah keseluruhan penerima bantuan sosial di Kota Semarang, hal tersebut karena dari pihak terkait tidak memberikan akses terhadap data tersebut.

2. Penelitian ini hanya menggunakan data jumlah penerima bantuan sosial di wilayah kecamatan Semarang Utara saja yang menjadi lokus dari penelitian ini.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diperhatikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini.
2. Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial sembako di Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya.
3. Dinas Sosial Kota Semarang harus lebih meningkatkan lagi kualitas finalisasi data penerima bantuan sosial yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat

menurut permensos, hal tersebut agar masalah terkait ketidaktepatan target dapat lebih diminimalisir.

4. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti dapat menambah atau memperoleh data total seluruh penerima bantuan sosial sembako di Kota Semarang, sebagai data pendukung dalam memperkuat data-data yang telah diperoleh sebelumnya.